



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

Rencana Strategis 2020 - 2024

Reviu ke-IV (2024)



Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri
Balai Diklat Industri Denpasar

Jl. WR Supratman 302, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur
+62 (361) 465455

bdidenpasar.kemenperin.go.id

Pengantar



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan anugerahNya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai Diklat Industri Denpasar tahun 2020 - 2024 reviu IV dapat diselesaikan.

Penyusunan Renstra ini berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian RI Nomor: 40/M-IND/PER/5/2014 yang dituangkan ke dalam bentuk kegiatan bidang operasional maupun bidang pembinaan dengan maksud untuk dapat dipergunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BDI Denpasar selama 5 (lima) tahun.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu sangat diharapkan adanya masukan-masukan yang konstruktif.

Akhirnya kami sampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah ikut membantu penyusunan Renstra ini dan semoga dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas.



Denpasar, 14 Oktober 2024

Arga Mahendra, S.H, M.H
Kepala Balai Diklat Industri Denpasar



Daftar Isi

	Halaman
Pengantar	i
BAB I Pendahuluan	3
Kondisi Umum Pembangunan Industri Nasional	3
Kondisi Umum Pembangunan SDM Industri	12
Potensi dan Permasalahan	15
Maksud dan Tujuan	20
Tugas Pokok dan Fungsi	20
Ruang Lingkup	21
BAB II Visi Misi dan Tujuan	22
Visi	22
Misi	23
Tujuan	24
Sasaran Strategis	25
Perspektif Pemangku Kepentingan	26
Perspektif Proses Internal	26
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan	27
BAB III Arah Kebijakan dan Strategi	28
Arah Kebijakan dan Strategi BPSDMI 2020-2024	28
Arah Kebijakan dan Strategi BDI Denpasar 2020-2024	32
Kerangka Regulasi	41
Kerangka Kelembagaan	41
BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	45
Indikator dan Target Kinerja	45
Program Kerja dan Kegiatan	47
Kerangka Pendanaan	51
BAB V Penutup	50
Lampiran	51



Daftar Gambar & Tabel

	Hal
Tabel 1.1 - PBD Nasional, PBD Industri Manufaktur, dan Kontribusinya	7
Tabel 1.2 - Capaian Sektor Kreatif tahun 2019 di Indonesia	8
Tabel 1.3 - PDB Sektor Ekonomi Kreatif (2015 – 2020)	8
Tabel 1.4 - Indikator Pembangunan Subsektor Film Animasi & Video tahun 2020	9
Tabel 1.5 - Indikator Pembangunan Subsektor Aplikasi dan Game Developer tahun 2020	10
Tabel 1.6 - Indikator Pembangunan Subsektor Kriya tahun 2020	11
Tabel 1.7 - Latar Belakang Pendidikan SDM Industri	12
Tabel 1.8 - Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Ekonomi Kreatif (2020 - 2021)	13
Tabel 1.9 - Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektor Kreatif 2011 - 2021	13
Tabel 1.10 - Lulusan Diklat 3 in 1 Periode 2015-2019 (Orang)	14
Tabel 1.11 - Wirausaha Industri yang Mengikuti Inkubator Bisnis 2015-2019 (Orang)	14
Tabel 1.12 - Sarana Prasarana	15
Tabel 1.13 - Peralatan Pendukung	16
Tabel 1.14 - SDM BDI Denpasar	16
Tabel 1.15 - Jenjang Pendidikan SDM BDI Denpasar	17
Tabel 2.1 - Tujuan BDI Denpasar	24
Tabel 3.1 - Kerangka Regulasi	41
Tabel 3.2 - Spesialisasi Balai Diklat Industri	42
Tabel 4.1 - Indikator Kinerja Kegiatan	45
Tabel 4.2 - Program dan Kegiatan untuk Mencapai Sasaran Strategis	47
Tabel 4.3 - Kerangka Pendanaan TA 2020	49
Tabel 4.4 - Kerangka Pendanaan TA 2021 - 2024	49
Gambar 1.1 - Arah Kebijakan Pembangunan Industri UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	4
Gambar 1.2 - Arah dan Kebijakan Pembangunan Industri dalam RIPIN (sumber : PP No. 14/2015 RIPIN 2015 – 2035)	5
Gambar 1.3 - Struktur Industri Nasional (Sumber : PP No. 14/2015)	6
Gambar 3.1 - SWOT	39
Gambar 3.2 - Struktur Organisasi	44



BAB I

PENDAHULUAN

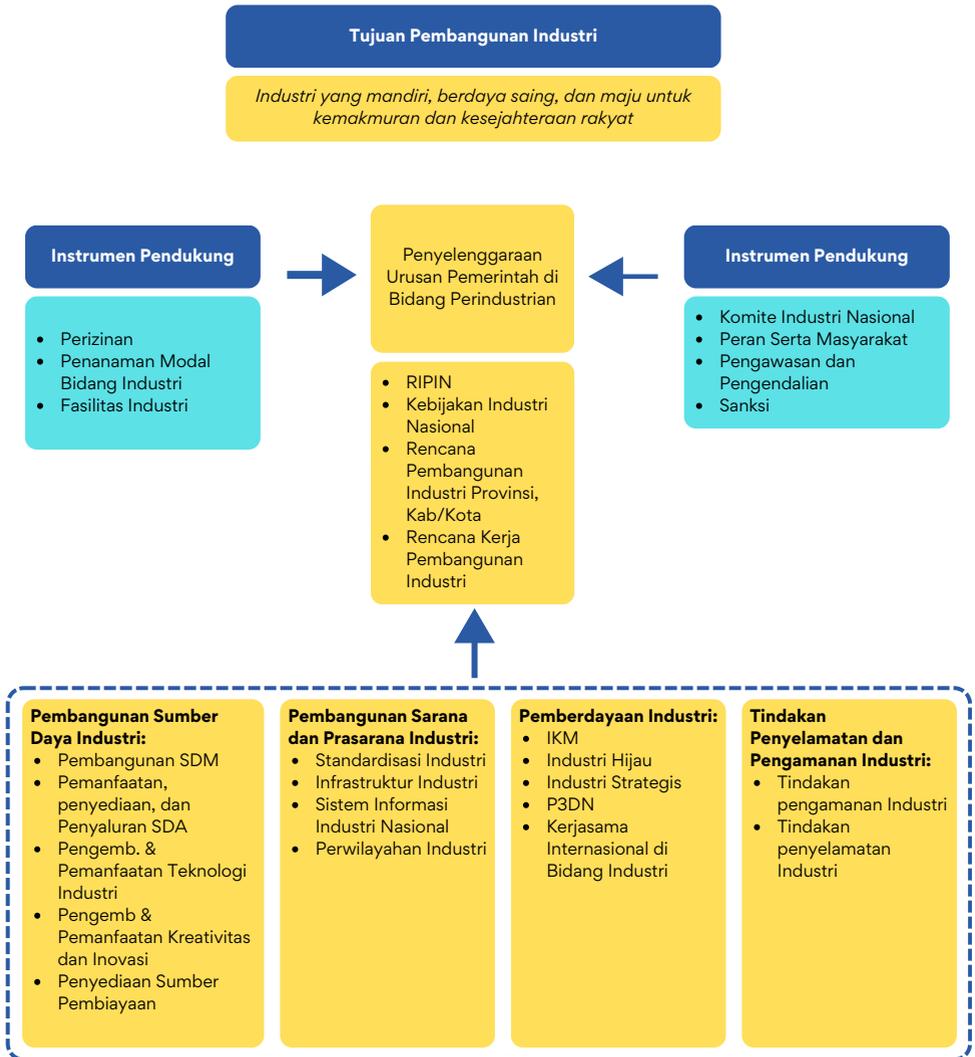
1.1 Kondisi Umum Pembangunan Industri Nasional

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada Pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana.

Peran penting sektor industri ini kemudian dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dimana industri diletakkan sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian menjalankan peran besar sebagai aktor utama pendorong kemajuan industri nasional secara sistematis dan terencana agar mampu mengejar ketertinggalan dari negara lain sesuai dengan visi Indonesia Maju 2030.

Kementerian Perindustrian menuangkan arah dan kebijakan pembangunan industri nasional dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015 – 2035 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

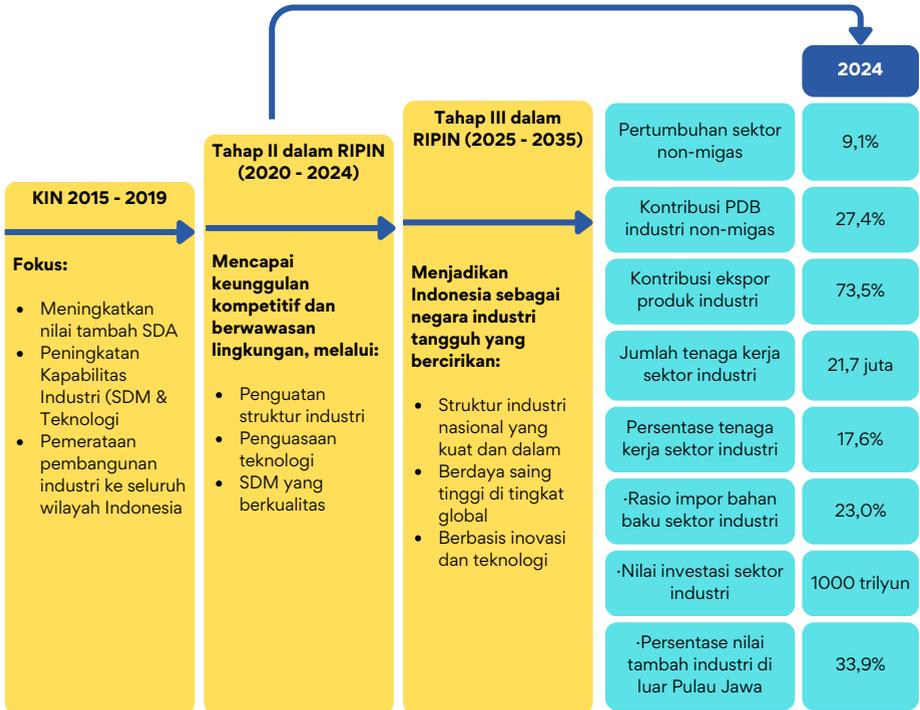
Nomor 14 Tahun 2015 sebagai pelaksana amanat Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Sebagai peta jalan pembangunan industri jangka panjang, RIPIN 2015 – 2035 merupakan pedoman bersama bagi Pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan industri di Indonesia.



Gambar 1.1 - Arah Kebijakan Pembangunan Industri UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

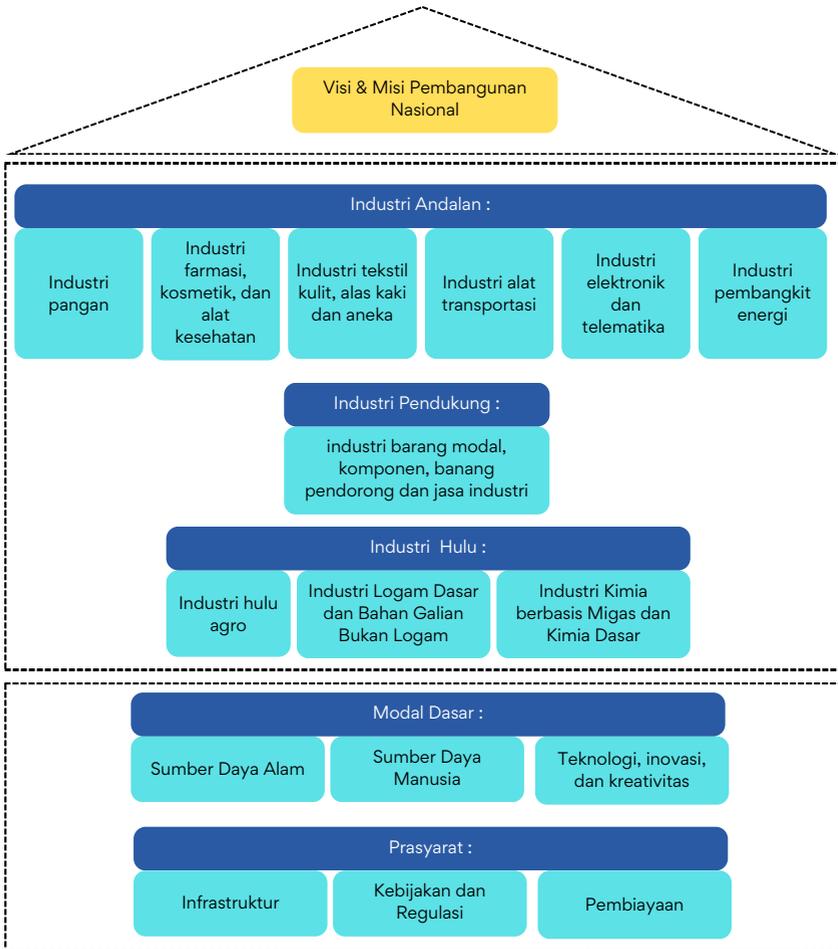
RIPIN tahun 2015 – 2035 telah membagi tahapan pembangunan Industri ke dalam tiga tahap:

- Tahap I (2015 – 2019) diarahkan pada peningkatan nilai tambahan sumberdaya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral, dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM (wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri, dan konsultan industri) yang ahli dan kompeten di bidang Industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.
- Tahap II (2020 – 2024) diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.
- Tahap III (2025 – 2035) adalah visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi



Gbr 1.2 - Arah dan Kebijakan Pembangunan Industri dalam RIPIN (sumber : PP No. 14/2015 RIPIN 2015 – 2035)

Saat ini implementasi RIPIN telah memasuki tahap II, yang dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Nasional (KIN) periode 2020 – 2024. Dalam KIN terdapat 10 kelompok industri yang menjadi prioritas pengembangan selama periode 2020 – 2024 : (1) Industri Pangan; (2) Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan; (3) Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka; (4) Industri Alat Transportasi; (5) Industri Elektronika dan Telematika; (6) Industri Pembangkit Energi; (7) Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri; (8) Industri Hulu Agro; (9) Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam; (10) Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara



Gambar 1.3 – Struktur Industri Nasional (Sumber : PP No. 14/2015)

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan sektor industri non-migas, setidaknya dibutuhkan pertumbuhan sektor industri sebesar 6,2% setiap tahunnya agar dapat memberikan kontribusi sebesar 19,4% terhadap PDB dengan jumlah ekspor produk industri diharapkan mencapai 77,6% dari total ekspor Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan sekitar 17,1 juta tenaga kerja sektor Industri dengan proyeksi kebutuhan tenaga kerja sebesar 600 ribu pekerja setiap tahun. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem pendidikan dan pelatihan yang dapat menjembatani antara siswa dengan industri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri setiap tahunnya. Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi merupakan subsistem yang berfungsi mewujudkan SDM yang kompeten baik pada tatanan manajerial maupun operasional. Maka dari itu, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan selalu diarahkan pada terwujudnya SDM yang handal, efektif, dan efisien baik untuk saat ini maupun masa mendatang.

Kontribusi sektor industri manufaktur dengan 23 subsektornya, terhadap Produk Domestik Bruto ialah sebesar 19,6% pada tahun 2019 dan sebesar 20,6% pada tahun 2020, hal ini menunjukkan bahwa industri manufaktur menjadi salah satu leading sector yang memberikan sumbangan terbesar, jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Meski demikian penurunan permintaan dari luar negeri dan pembatasan mobilitas barang, jasa, serta tenaga kerja menyebabkan terjadinya kontraksi pertumbuhan industri manufaktur, sebesar -2,93% pada tahun 2020[1].

Tabel 1.1 – PDB Nasional, PDB Industri Manufaktur, dan Kontribusinya

Indikator	Sat	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PDB Nasional	%	4,88	5,03	5,07	5,18	5,02	-2,07
PDB Industri Manufaktur	%	4,33	4,26	4,29	4,27	3,80	-2,93
Kontribusi PDB Industri Manufaktur terhadap PDB Nasional	%	20,9	20,5	20,1	19,8	19,6	20,6

[1] BPS, Perkembangan Indeks Produksi Manufaktur 2020

1.1.1 Kondisi Umum Pembangunan Industri Sektor Kreatif

Balai Diklat Industri Denpasar sebagian bagian dari Kementerian Perindustrian, sesuai Keputusan Pusdiklat Industri No. 192/SJ.IND/PER/1202012, memiliki fokus spesialisasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri kreatif meliputi animasi, kerajinan, dan barang seni. Rencana Strategis BDI Denpasar secara spesifik terkait dengan kondisi pembangunan industri kreatif di Indonesia.

Berdasarkan data BPS per tanggal 31 Desember 2019, diperoleh informasi agregat tentang capaian sektor kreatif di Indonesia tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 1.2 – Capaian Sektor Kreatif tahun 2019 di Indonesia

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif (%)	5,3	5,1	96,23
2	Serapan Tenaga Kerja (juta orang)	17,20	19,01	110,52
3	Nilai Ekspor Bruto (miliar USD)	21,50	22,06	102,60

Kondisi sektor industri kreatif yang terdiri dari 17 subsektor yakni; Aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain produk, desain interior, fotografi, musik, kriya, kuliner, fesyen, penerbitan, film animasi dan video, periklanan, permainan interaktif, seni pertunjukan, seni rupa, TV dan Radio, pada tahun 2020 tercatat menyumbang PDB sebesar Rp1.105 triliun[2], atau sekitar 7,15% dari PDB Nasional. Di tahun 2020 capaian PDB sektor ekonomi kreatif turun sebesar 4,16% terhadap capaian pada 2019 yang mencapai Rp1.153,4 triliun.

Tabel 1.3 – PDB Sektor Ekonomi Kreatif (2015 – 2020)

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PDB (Rp. Triliun)	852	923	989	1.066	1.153	1.105

(Sumber : Lembaga Demografi FEB UI)

[2] OPUS Ekonomi Kreatif 2020

Mencermati perkembangan nilai PDB, subsektor industri yang paling terdampak adalah subsektor penyediaan makanan dan minuman yang terindikasi memuat subsektor kuliner. Kontraksi yang dialami di triwulan III 2020 mencapai 8,05%[3]. Di sisi lain, subsektor industri pengolahan yang terindikasi memuat subsektor kuliner dan fesyen mengalami kontraksi sebesar 4,52% di triwulan III 2020

Angka – angka ini memberi gambaran, seberapa besar dampak pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif, utamanya pada tiga subsektor andalan: kuliner, kriya, dan fesyen.

Untuk subsektor film animasi & video, aplikasi, dan game developer, dan kriya diperoleh data yang cukup bervariasi, yang menggambarkan performa ketiga subsektor ekonomi kreatif tersebut di tahun 2020.

Di tahun 2020, subsektor film, animasi, dan video menyumbang Rp2,35 Triliun pada PDB Nasional, atau 0,21% dari keseluruhan PDB nasional 2020. Pertumbuhan subsektor film animasi dan video di tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 0,03%. Terdapat 42.053 jumlah orang yang bekerja di subsektor film animasi dan video di tahun 2020.

Tabel 1.4 - Indikator Pembangunan Subsektor Film Animasi & Video tahun 2020

Indikator	Satuan	Jumlah
PDB (Rp. Triliun)	Rp Triliun	2,35
% Kontribusi Terhadap PDB Nasional	%	0.21
Pertumbuhan PDB	%	-0,03
Jumlah Tenaga Kerja	Orang	42.053
Distribusi pelaku industri kreatif Indonesia yang bekerja di subsektor film animasi, dan video	Persen	0,2
Rata – rata upah bulanan pekerja kreatif di subsektor film, animasi, & video	Rp	5.048.137

(Sumber : Lembaga Demografi FEB UI)

[3] Buku Outlook Pariwisata Ekonomi Kreatif 2021

Subsektor aplikasi dan game developer (AGD) adalah bagian dari Industri kreatif, dimana informasi, pengetahuan, serta kreativitas para pelaku industri ini menjadi bahan baku utama. Dampak pandemi COVID-19 terhadap e-commerce di area aplikasi menunjukkan pertumbuhan positif. Berdasarkan data laporan e-Commerce SEA 2020, nilai transaksi e-Commerce Indonesia sendiri meningkat 5,4% dari tahun 2019. Meski demikian di tahun 2020, berapa sektor online yang bergerak di bidang transportasi, makanan, dan travel mengalami penurunan. Pada transportasi dan makanan online menurun sebesar 18%, sedangkan travel online menurun sebesar 68%. Di area game developer, Pandemi COVID-19 menghadirkan dinamika yang unik. Di saat pengembang game mandiri meraup keuntungan, pengembang game yang melayani jasa pembuatan game untuk korporasi (gamefication of customer experience) mengalami kontraksi akibat banyak perusahaan yang melakukan efisiensi dan realokasi budget terkait pandemi.

Tabel 1.5 - Indikator Pembangunan Subsektor Aplikasi dan Game Developer tahun 2020

Indikator	Satuan	Jumlah
PDB (Rp. Triliun)	Rp Triliun	24,88
% Kontribusi Terhadap PDB Nasional	%	2,19
Pertumbuhan PDB	%	4,47
Jumlah Tenaga Kerja	Orang	48.731
Distribusi pelaku industri kreatif Indonesia yang bekerja di subsektor film animasi, dan video	Persen	0,3
Rata – rata upah bulanan pekerja kreatif di subsektor film, animasi, & video	Rp	6.387.285

(Sumber : Lembaga Demografi FEB UI)

Subsektor Kriya sebagai subsektor yang meliputi segala kerajinan yang berbahan kayu, logam, kulit, kaca, keramik, dan tekstil.

Pandemi COVID-19 membawa dampak yang cukup besar bagi pelaku subsektor kriya. Untuk para pedagang dan studio, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat hilangnya kesempatan berjualan. Produksi Kriya menurun karena rendahnya permintaan (demand) nasional dan internasional, ekspor juga mengalami kendala akibat pembatasan perjalanan barang. Kondisi ini membuat banyak pelaku kriya memanfaatkan e-commerce, berjualan secara online di marketplace.

Tabel 1.6 - Indikator Pembangunan Subsektor Kriya tahun 2020

Indikator	Satuan	Jumlah
PDB (Rp. Triliun)	Rp Triliun	166,13
% Kontribusi Terhadap PDB Nasional	%	16,64
Pertumbuhan PDB	%	-3,31
Jumlah Tenaga Kerja	Orang	3.912.399
Distribusi pelaku industri kreatif Indonesia yang bekerja di subsektor film animasi, dan video	Persen	20,9
Rata – rata upah bulanan pekerja kreatif di subsektor film, animasi, & video	Rp	2.366.811

(Sumber : Lembaga Demografi FEB UI)

Kondisi Umum Pembangunan SDM Industri

Dalam RPJMN IV (2020 – 2024) disebutkan salah satu agenda pembangunan ialah meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Dijadikannya Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing sebagai salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN IV tentu dilandasi oleh analisis mengenai kondisi Indonesia saat ini, dan proyeksi kondisi Indonesia di masa yang akan datang, khususnya dalam aspek sumber daya manusia.

Indonesia saat ini menempati rangking ke-4 dunia dalam hal jumlah penduduk. Berdasarkan data administrasi kependudukan (Adminduk) per juni 2021 jumlah penduduk Indonesia ada sebanyak 272.229.372 jiwa, dimana 137.521.557 jiwa adalah laki-laki, dan 134.707.815 jiwa adalah perempuan.

Dari total 272 juta tersebut, sebesar 56,01% terkonsentrasi di Pulau Jawa, dimana Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, yakni sebanyak 47.586.943 jiwa. Sedangkan Provinsi dengan penduduk tersedikit adalah Kalimantan Utara sebanyak 692.239 jiwa.

Salah satu kekuatan penting dalam komposisi demografi Indonesia adalah jumlah Angkatan Kerja (penduduk usia kerja, 15 tahun ke atas) sebanyak 138.22.938 juta jiwa[4] atau sebesar 51,1% dari total penduduk Indonesia. Apabila dapat dikelola dengan baik, tingginya jumlah penduduk usia kerja dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, namun bila tidak dikelola dengan baik, keunggulan demografi ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial.

Dari 138,2 juta penduduk yang termasuk dalam kategori Angkatan Kerja, sebanyak 128,4 juta (92,9%) diantaranya bekerja. 13,61% dari pekerja tersebut adalah SDM industri. 56,8% dari SDM industri tersebut bekerja sebagai buruh, karyawan atau pegawai, dengan latar belakang pendidikan SD (31,9%), SMP (22,4%), SMA/K (39,9%) dan perguruan tinggi (5,8%).

Tabel 1.7 – Latar Belakang Pendidikan SDM Industri

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jumlah Angkatan Kerja	%
Sekolah Dasar	5.572.161	31,9
Sekolah Menengah Pertama	3.915.774	22,4
Sekolah Menengah Atas	6.978.649	39,9
Perguruan Tinggi	1.016.265	5,8
Jumlah	17.482.849	100

[4] BPS, Statistik Indonesia 2021 hal.95

Khusus untuk ekonomi kreatif berdasarkan temuan Balai Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja sektor ekonomi kreatif sepanjang 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan penurunan terbesar dialami pekerja di subsektor aktivitas hiburan (musik, film, dan seni pertunjukan) yang mencapai 49,32%, disusul oleh subsektor TV dan Radio yang mencapai 37,18%[5]. Meski secara agregat terjadi penurunan, menariknya terdapat 5 subsektor yang mengalami kenaikan jumlah pekerja, yaitu telekomunikasi, aktivitas pemrograman, aktivitas jasa informasi, aktivitas kantor pusat, aktivitas arsitektur dan perusahaan yang terindikasi memuat pekerjaan di subsektor aplikasi, game developer, dan arsitektur.

Jumlah SDM Industri khususnya yang bekerja pada sektor ekonomi kreatif di tahun 2020 dan 2021 ditampilkan dalam tabel 1.8 berikut

Tabel 1.8 – Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Ekonomi Kreatif (2020 - 2021)

Subsektor	2020	2021
Arsitektur	57.152	59.135
Desain : Interior, Komunikasi Visual, Produk	29.651	30.914
Film, Animasi, & Video	42.053	43.225
Fotografi	73.113	76.994
Kriya	3.912.399	3.993.174
Kuliner	9.248.918	9.446.438
Musik	61.753	63.676
Fesyen	4.332.409	4.429.238
Aplikasi, & Game Developer	48.731	52.842
Penerbitan	555.326	572.260
Periklanan	46.411	48.022
Televisi & Radio	89.753	97.666
Seni Pertunjukan	211.589	222.822
Seni Rupa	51.721	53.661

(Sumber : Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2021)

Rata - rata pertumbuhan jumlah tenaga kerja pada sektor ekonomi kreatif adalah 3,6% setiap tahun seperti dalam tabel 1.9

Tabel 1.9 – Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektor Kreatif 2011 - 2021

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja	Pertumbuhan (%)
2011	13.447.184	-
2012	14.491.426	7,8
2013	14.734.949	1,7
2014	15.167.573	2,9
2015	15.959.590	5,2
2016	16.909.690	6,0

[5] Buku Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2021

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja	Pertumbuhan (%)
2017	17.678.878	4,5
2018	18.497.322	4,6
2019	19.240.184	4,0
2020	18.760.979	-2,5
2021	19.190.067	2,3
	Rata-rata Pertumbuhan (%)	3,6

Dengan rata-rata pertumbuhan tenaga kerja sebesar 3,6%^[6] per tahun, diproyeksikan kebutuhan tenaga kerja sektor ekonomi kreatif sebanyak 690.000 orang pada tahun 2022, sebanyak 715.000 orang pada tahun 2023, dan 741.000 orang pada tahun 2024, di berbagai subsektor ekonomi kreatif. Kebutuhan tenaga kerja sektor ekonomi kreatif yang cenderung meningkat setiap tahunnya perlu diimbangi dengan meningkatkan jumlah SDM industri yang kompeten dan berdaya saing

Pembangunan SDM Industri oleh BDI Denpasar Periode 2015-2019

Selama periode 2015-2019, BDI Denpasar telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk SDM Industri, juga telah melakukan pembinaan dan fasilitasi untuk wirausaha industri (rintisannya). Dari target jangka menengah yang diberikan BDI Denpasar berhasil mencapai dan melampaui target tersebut dengan total output sebanyak 5679 orang lulusan Diklat 3 in 1, dan 402 orang wirausaha industri.

Tabel 1.10 – Lulusan Diklat 3 in 1 Periode 2015-2019 (Orang)

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2015	300	288	96
2016	550	485	88
2017	1000	1119	112
2018	1500	1707	113
2019	2000	2080	104
total	5350	5679	106

Tabel 1.11 – Wirausaha Industri yang Mengikuti Inkubator Bisnis 2015-2019 (Orang)

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2015	75	104	138
2016	85	74	87
2017	58	79	136
2018	45	66	146
2019	60	79	171
total	323	402	124

Potensi

Balai Diklat Industri Denpasar merupakan unit eselon III di bawah Pusdiklat Industri dengan lingkup pelayanan nasional, berbasis kompetensi dengan spesialisasi di bidang industri kreatif, khususnya animasi, kerajinan, dan barang seni sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Sekjen Kementerian Perindustrian Nomor: 09/SJ.IND/Per/10/2021 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 40/M-IND/PER/5/2014. Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 72/M-IND/PER/9/2015 tentang Peta Panduan Pengembangan Bali Creative Industry Center tahun 2015 disebutkan pula ruang lingkup industri kreatif yang ditangani mencakup permainan (game) berbasis aplikasi dan perangkat lunak.

Balai Diklat Industri Denpasar memiliki sarana dan prasarana yang menunjang pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, serta inkubasi bisnis. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki BDI Denpasar antara lain :

Tabel 1.12 – Sarana Prasarana

No	Uraian	Jumlah	Kapasitas (orang)
1	Tempat Ibadah	2	40
2	Laboratorium Komputer	7	175
3	Kamar Asrama untuk Peserta Diklat 3 in 1	51	106
4	Kamar Asrama untuk Peserta Diklat Aparatur dan Umum (Kuta)	15	50
5	Gedung Makerspace	1	10
6	Gedung Pameran	4	40
7	Ruang Mini Theatre	1	15
8	Ruang Sound Recording	1	3
9	Ruang Motion Capture	1	2
10	Ruang Gym	1	15
11	Ruang Rapat	1	20
12	Ruang Podcast	1	3
13	Ruang Audiovisual	1	20
14	Area Tenant (Inkubasi Bisnis)	1	80
15	Ruang Kantin	1	120
16	Gedung Fashion dan Design Lt.1, 2, 3	1	100
17	Area Olahraga (Lapangan Tenis dan Lapangan Basket)	1	215
18	Ruang Kelas Utama	1	100

Sarana dan prasarana tersebut tentunya telah dilengkapi dengan berbagai peralatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan pelatihan, dan inkubasi bisnis antara lain:

Tabel 1.13- Peralatan Pendukung

No	Uraian	Jumlah
1	PC Desktop spesifikasi Design dan Rendering	143 Unit
2	iMac untuk diklat IOS	25 Unit
3	Pen tablet (Digitizer)	72 Unit
4	Mesin Laser Cutting	1 Unit
5	Mesin 3D Print	1 Unit
6	Peralatan Motion Capture	1 Set
7	Peralatan Sound Recording	1 Set
8	Peralatan Audio Visual Podcasting	1 Set
9	Peralatan Audio Visual Miniteater	1 Set
10	Peralatan Audio Visual Ruang Kelas dan Lab. Komputer	12 Unit
11	Peralatan Gym	9 Unit

Selain memiliki sarana prasarana dan peralatan, BDI Denpasar juga memiliki SDM yang terdiri dari 5 PPPK dan 26 PNS, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.14 - SDM BDI Denpasar

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Kepala Balai	1
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1
3	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1
4	Analisis Perencanaan	1
5	Arsiparis Ahli Pertama	1
6	Instruktur Ahli Pertama	6
7	Instruktur Mahir	1
8	Operator Layanan Operasional	2
9	Pelaksana	1
10	Pembina Industri Ahli Madya	1
11	Pembina Industri Ahli Muda	1
12	Penata Laksana Barang Terampil	1
13	Penata Layanan Operasional	1
14	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	1
15	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	1
16	Pengolah Data dan Informasi	2
17	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	1

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
18	Pranata Humas Ahli Pertama	1
19	Pranata Humas Terampil	1
20	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1
21	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
22	Pranata Komputer Terampil	1
23	Widyaiswara Ahli Madya	1
24	Widyaiswara Ahli Muda	1

ASN BDI Denpasar memiliki jenjang pendidikan dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel 1.15 – Jenjang Pendidikan SDM BDI Denpasar

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Sekolah Dasar	1
2	Sekolah Menengah Atas	1
3	Diploma-3	6
4	Strata-1	13
5	Strata-2	10

Secara ringkas, potensi BDI Denpasar adalah sebagai berikut:

- Presentase usia pegawai dalam kategori sangat produktif diantara 25-45 Tahun sebesar 80% sehingga mampu menunjang kinerja satuan kerja lebih produktif dan dinamis
- Hampir semua pegawai telah memiliki tingkat literasi digital yang optimal dan memahami budaya kerja ASN
- Organisasi telah mampu menerapkan standar layanan prima yang dibuktikan dengan perolehan predikat WBK pada tahun 2022
- Lokasi satuan kerja yang berada di Kota Denpasar, Provinsi Bali yang merupakan salah satu kawasan pariwisata dan hub Internasional di Indonesia
- Fasilitas perkantoran yang lengkap dan berkualitas baik dalam menunjang tugas pokok dan fungsi
- Mempunyai jejaring kerjasama yang luas baik lokal, nasional hingga internasional
- Berpengalaman dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang industri kreatif selama hampir 10 tahun, pendidikan di bidang aparatur 40 tahun, serta inkubator bisnis industri kreatif selama 9 tahun.
- Berpengalaman dalam menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan di level nasional dan internasional.
- Mempunyai LSP P1 untuk melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi profesi untuk peserta diklat
- Mempunyai lembaga inkubator yang terdaftar di SIPENSI dan AIBI untuk melaksanakan program pengembangan kompetensi kewirausahaan

- Mempunyai tenaga kediklatan bidang industri yang terdiri dari instruktur, widyaiswara, serta pembina industri dan sudah memperoleh sertifikasi keahlian sesuai bidang ampuan
- Mempunyai tenaga pendukung kediklatan dari kelompok jabatan fungsional tertentu di bidang pengadaan, humas, pengelolaan keuangan, dan pengelola BMN
- Menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015
- Memiliki reputasi yang baik di masyarakat terbukti dengan antusiasme publik di akun offiisial media sosial satuan kerja yang cukup tinggi

Terdapat pula faktor-faktor eksternal sebagai berikut:

- Minat generasi muda yang tinggi terhadap sektor industri kreatif terutama terkait industri konten digital
- Target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 9% tentu akan menuntut kontribusi yang lebih besar dari sektor industri kreatif dan kewirausahaan
- Perubahan cepat teknologi membuka bidang-bidang profesi baru sehingga menuntut penguasaan kompetensi kerja yang baru
- Makin meningkatnya reputasi Pulau Bali sebagai kawasan ekonomi bertaraf internasional akan memperkuat posisi BDI Denpasar dalam menjalin kerjasama kegiatan pelatihan maupun inkubasi bisnis dengan berbagai pihak baik level nasional maupun internasional
- Kebangkitan ekonomi pasca pandemi COVID yang ditandai dengan percepatan digitalisasi membuat bidang spesialisasi BDI Denpasar sangat menarik minat masyarakat serta pemangku kebijakan di pusat dan daerah dalam berkolaborasi sehingga mampu menambah kapabilitas dalam pelaksanaan layanan
- Terbukanya kesempatan mendapat sumber pendanaan kegiatan melalui mekanisme PNBP akan mulai mengurangi ketergantungan pada alokasi APBN, sehingga mampu menaikkan produktivitas satuan kerja

1.3.2 Permasalahan

Masalah didefinisikan sebagai adanya kesenjangan antara teori (harapan) dengan fakta empiris (kenyataan), serta apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia. Beberapa permasalahan yang dialami oleh BDI Denpasar antara lain:

- Untuk beberapa bidang spesialisasi masih tergantung dari instruktur eksternal
- Sumber pendanaan kegiatan masih sangat tergantung dari alokasi APBN
- Cukup lambat dalam proses pengembangan dan penambahan skema sertifikasi sesuai tren kebutuhan industri
- Kecukupan jumlah pegawai masih kurang jika dibandingkan dengan volume dan beban pekerjaan
- Persepsi dunia industri terhadap kualitas alumni di beberapa skema pelatihan belum cukup baik
- Presentase angka kematian usaha yang mengikuti program inkubasi bisnis masih cukup tinggi walaupun mengalami tren penurunan
- Peralatan penunjang pelatihan sebagian besar telah berumur lebih dari 6 tahun sehingga mulai mengalami penurunan performa serta mulai ketinggalan dari sisi teknologi, hal tersebut berpotensi menurunkan kualitas layanan serta menghambat pelaksanaan pelatihan yang membutuhkan teknologi tinggi dalam 5 tahun mendatang.

Yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, antara lain:

- Sulitnya mencari mitra Venture Capital dan Angel Investor untuk mengakselerasi pertumbuhan tenant binaan
- Perubahan kebijakan yang cukup dinamis terutama dalam pengelolaan anggaran APBN membawa potensi mengambat pelaksanaan program kerja
- Perkembangan teknologi yang membawa perubahan cepat dalam jenis serta jumlah kebutuhan kompetensi di bidang industri yang dibina
- Fenomena pembinaan kewirausahaan yang massive tetapi belum tersinergikan oleh berbagai pihak baik instansi pemerintahan, swasta, dan lembaga pendidikan sehingga berpotensi membawa ke dalam kondisi “rebutan talent binaan”
- Masih terdapat gap yang cukup tinggi antara inputan pelatihan dengan syarat minimum peserta pelatihan sehingga menyebabkan kondisi yang tidak ideal

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra dimaksudkan untuk memenuhi amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Renstra Balai Diklat Industri Denpasar Diturunkan dari Renstra BPSDMI yang bertujuan untuk memberi arah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki guna mendukung target capaian dalam lima tahun ke depan yang telah ditetapkan oleh BPSDMI.

1.5 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022, tanggal 21 Februari 2022, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, Tugas Pokok dan Fungsi BDI Denpasar adalah sebagai berikut:

Tugas Pokok

Pasal 2 *Balai Diklat Industri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri*

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Diklat Industri menyelenggarakan fungsi:

- Pasal 3**
- 1. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia aparatur;*
 - 2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja industri dan wirausaha industri yang berbasis spesialisasi dan kompetensi;*
 - 3. Pelaksanaan uji kompetensi, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja industri;*
 - 4. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi kewirausahaan industri;*
 - 5. Pelaksanaan identifikasi kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan dunia usaha industri;*
 - 6. Pelaksanaan pengembangan program pendidikan dan pelatihan industri;*
 - 7. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, kerjasama, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan tangga; dan*
 - 8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan*

Ruang Lingkup

Renstra BDI Denpasar merupakan penjabaran dari visi BPSDMI untuk menjadi penggerak pembangunan SDM Industri yang kompeten, dan berdaya saing. Renstra ini mengacu pada Renstra BPSDMI Tahun 2020 – 2024. Ruang lingkup dari Renstra ini berkaitan dengan pembangunan SDM Industri yang kompeten, penyediaan tenaga kerja yang terampil dan sesuai dengan kebutuhan industri, serta membangun manajemen pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Diklat Industri Denpasar.



BAB II

VISI MISI & TUJUAN

2.1 Visi

Salah satu prioritas Pemerintah dalam pembangunan sektor Industri yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, serta meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) sebagai induk organisasi Balai Diklat Industri Denpasar memiliki visi :

Menjadi Vokasi Industri Bertaraf Global untuk Mendukung Pembangunan Industri Nasional yang Berdaya Saing dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Industri Tangguh

Sejalan dengan visi tersebut, BDI Denpasar juga senantiasa menjunjung nilai – nilai yang telah ditetapkan bagi pegawai Kemenperin yakni untuk menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan semangat bergotong royong, yang diharapkan berdampak positif bagi pertumbuhan industri di Indonesia. Nilai – nilai tersebut terdiri dari integritas, profesional, inovatif, produktif, dan kompetitif. Lima nilai ini disebut sebagai INSAN OKE yang harus diketahui, dipahami, dan diamalkan oleh semua aparaturnya Kementerian Perindustrian ketika bekerja, bersikap, dan berkontribusi dalam pengembangan Industri Nasional.

2.2 Misi

Misi BDI Denpasar merupakan cascading dari misi BPSDMI, terdapat 8 (delapan) misi pembangunan BPSDMI sebagai berikut :

- Mengembangkan pendidikan vokasi industri dual system bertaraf global sebagai referensi model pendidikan vokasi nasional
- Mengembangkan dan menyelenggarakan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri
- Membangun Balai Diklat Industri sebagai Center of Excellences pembangunan tenaga kerja industri
- Membangun Pusat Industri Digital 4.0 (PIDI 4.0) sebagai hub dan ecosystem center industri 4.0
- Mengembangkan kelembagaan inkubator bisnis industri pada lembaga pendidikan dan pelatihan industri
- Membangun Digital ASN Talent Pool dan Knowledge Management Center sebagai Pusat Pembinaan ASN Pembina Industri
- Membangun pusat pengembangan (development center) infrastruktur kompetensi industri
- Membangun wadah (hub center) sinergi, kolaborasi, dan kerjasama dengan seluruh stakeholder nasional dan global dalam mengembangkan vokasi industri.

Dari misi BPSDMI tersebut dirumuskan 8 (delapan) misi pembangunan BDI Denpasar sebagaimana yang terdapat dalam buku Corporate University BPSDMI, sebagai berikut:

- Mengembangkan ruang lingkup dan spesialisasi jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri bidang animasi, digital content, dan IOT

- Mengembangkan program dan modul pelatihan berbasis kompetensi bidang animasi, digital content, dan IOT
- Menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi (skilling, up-skilling, dan reskilling) tenaga kerja industri bidang animasi, digital content, dan IOT dengan sistem 3 in 1
- Mengembangkan skema dan uji kompetensi LSP
- Mengembangkan sertifikasi kompetensi internasional
- Membangun dan mengembangkan sinergi serta menumbuhkan wirausaha industri digital dan kriya melalui penyelenggaraan inkubator bisnis
- Membangun dan mengembangkan smart training facility
- Menyelenggarakan pelatihan bagi ASN Pembina Industri atas penugasan dari BPSDMI

2.3 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pendidikan dan pelatihan SDM Industri seperti disebutkan di atas, Balai Diklat Industri Denpasar menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan Peta Strategis BDI Denpasar. Tujuan yang ingin dicapai oleh Balai Diklat Industri Denpasar yakni :

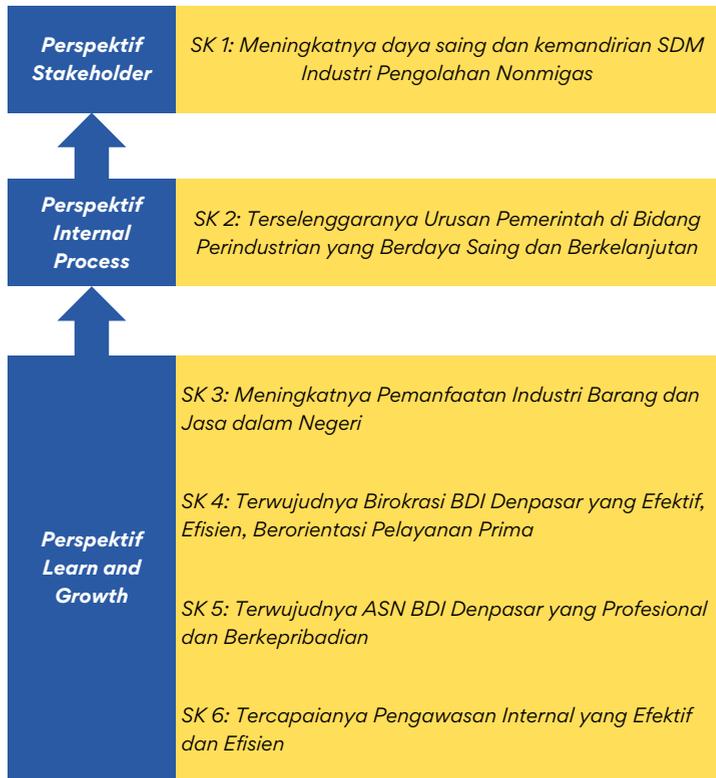
Meningkatnya peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh

Tabel 2.1 - Tujuan BDI Denpasar

Tujuan								
Kode	Sasaran Tujuan	Indikator Kinerja	Sat	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
TJ	Meningkatkan peran SDM industri dalam Perekonomian Nasional	Tersedianya SDM Industri yang Kompeten	Orang	2060	1880	2205	2810	9615

2.4 Sasaran Strategis

Sasaran program pendidikan dan pelatihan SDM Industri BDI Denpasar merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh BPSDMI sebagai suatu impact/outcome dari rangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BDI Denpasar. Dalam penyusunannya, BDI Denpasar menjabarkan tiap sasaran program dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard (BSC)* yang dibagi ke dalam 3 perspektif, yaitu *Stakeholder Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. Sasaran program tersebut diukur melalui indikator kinerja program. Peta strategi BDI Denpasar dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Gambar 2.1 - Peta Strategi BDI Denpasar 2020 - 2024

A Perspektif Pemangku Kepentingan

Perspektif pemangku kepentingan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terpengaruh dan memperoleh manfaat. Terkait dengan perspektif Pemangku Kepentingan terdapat 1 Sasaran Kegiatan yang ingin dicapai, yakni:

Sasaran Kegiatan Pertama (SK1) yang akan dicapai yaitu **“Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas”**, dengan indikator kinerja:

SK1.1: Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi bidang Animasi, Digital Content, dan IOT, dari 2000 orang di tahun 2020 menjadi 9500 orang di tahun 2024

B Perspektif Proses Internal

Perspektif proses internal berkaitan dengan proses menciptakan dan menyampaikan proposisi nilai pelanggan. Perspektif ini berfokus pada semua aktivitas dan proses utama yang diperlukan agar perusahaan unggul dalam memberikan nilai yang diharapkan oleh pelanggan baik secara produktif maupun efisien. Terkait Perspektif Proses Internal terdapat 1 Sasaran Kegiatan yang akan dicapai yakni:

Sasaran Kegiatan Kedua (SK2) yang akan dicapai adalah **“Terselenggaranya Urusan Pemerintah di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan”**, dengan indikator kinerja:

SK2.1: Inkubator Industri yang tumbuh, meningkat dari 12 tenant di tahun 2020 menjadi 23 tenant di tahun 2024;

SK2.2: Pengembangan Sertifikasi Kompetensi Internasional, meningkat dari 1 sertifikasi di tahun 2022 menjadi 3 sertifikasi di tahun 2024

C Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan adalah dasar dari setiap strategi dan berfokus pada aset tidak berwujud dari suatu organisasi, terutama pada keterampilan dan kemampuan internal yang diperlukan untuk mendukung proses internal yang menciptakan nilai. Terkait dengan Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan terdapat 4 Sasaran Kegiatan yang akan dicapai, yakni:

Sasaran Kegiatan Ketiga (SK3) yang akan dicapai adalah: **“Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri”**, dengan indikator kinerja :

SK3.1: Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan Barang dan Jasa di Balai Diklat Industri Denpasar, yang meningkat dari 50 persen di tahun 2021 menjadi 80 persen di tahun 2024

Sasaran Kegiatan Keempat (SK4) yang akan dicapai adalah: “**Terwujudnya Birokrasi Balai Diklat Industri Denpasar yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima**”, dengan indikator kinerja :

SK4.1: Nilai Laporan Keuangan Balai Diklat Industri Denpasar, yang meningkat dari nilai 70 di tahun 2021 menjadi 76 di tahun 2024

SK4.2: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Balai Diklat Industri Denpasar, yang meningkat dari nilai 78 di tahun 2020 menjadi 80 di tahun 2024

SK4.3: Nilai Kearsipan Balai Diklat Industri Denpasar, yang meningkat dari nilai 75 di tahun 2021 menjadi 80 di tahun 2024

Sasaran Kegiatan Kelima (SK5) yang akan dicapai adalah: “**Terwujudnya ASN Balai Diklat Industri Denpasar yang Profesional dan Berkepribadian**”, dengan indikator kinerja:

SK5.1: Rata – rata indeks Profesionalitas ASN Balai Diklat Industri Denpasar, yang meningkat dari indeks 71 di tahun 2021 menjadi 74 di tahun 2024

Sasaran Kegiatan Keenam (SK6) yang akan dicapai adalah: “**Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien**”, dengan indikator kinerja:

SK6.1: Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti, meningkat dari 91,5 persen di tahun 2021 menjadi 93 persen di tahun 2024

SK6.2: Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI), meningkat dari level 3 di tahun 2021 menjadi level 4 di tahun 2024.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPSDMI 2020 - 2024

Dalam rangka mewujudkan visi BPSDMI 2020 - 2024, yaitu Menjadi Vokasi Industri Bertaraf Global yang Mendukung Pembangunan Industri Nasional yang Berdaya Saing dalam Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh, BPSDMI menetapkan arah kebijakan BPSDMI 2020 - 2024 yang terbagi ke dalam empat bagian, yaitu:

1. Penguatan Kelembagaan Vokasi Industri
2. Penguatan Kelembagaan Politeknik dan Akademi Komunitas Industri
3. Penguatan Kelembagaan SMK Industri
4. **Penguatan Kelembagaan Balai Diklat Industri**

Terkait dengan Balai Diklat Industri, untuk memperkuat kelembagaan Balai Diklat Industri (BDI), BPSDMI memiliki delapan arah kebijakan, yaitu:

1	<i>Mengembangkan ruang lingkup dan spesialisasi jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri</i>
2	<i>Mengembangkan program dan modul pelatihan berbasis kompetensi</i>
3	<i>Menyelenggarakan Pelatihan berbasis kompetensi (skilling, upskilling, dan reskilling) tenaga kerja industri dengan sistem 3 in 1</i>
4	<i>Mengembangkan skema dan uji kompetensi LSP</i>
5	<i>Mengembangkan sertifikasi kompetensi internasional</i>
6	<i>Membangun sinergi serta menumbuhkan wirausaha industri melalui penyelenggaraan inkubator bisnis</i>
7	<i>Membangun smart training facility</i>
8	<i>Menyelenggarakan pelatihan bagi ASN yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian</i>

Mengembangkan Ruang Lingkup dan Spesialisasi Jenis Pelatihan yang Sesuai dengan Kebutuhan Industri

Hal ini dilakukan dengan melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kerja industri, Hasil pemetaan yang terstruktur dan komprehensif akan berujung pada penentuan pengembangan ruang lingkup dan spesialisasi BDI.

Mengembangkan program dan modul pelatihan berbasis kompetensi

Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) merupakan salah satu model program pengembangan SDM Industri khususnya dalam ranah Tenaga Kerja Industri yang telah diawali dan dilaksanakan sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini oleh Balai Diklat Industri (BDI) yang menjadi center dan role model pelatihan dengan skema 3 in 1 (pelatihan, uji kompetensi, dan penempatan pada sektor industri). Dengan telah ditetapkannya ruang lingkup dan spesialisasi BDI, masing-masing BDI harus melengkapi program dan modul pelatihan berbasis kompetensi agar dapat melaksanakan amanah pelatihan vokasi industri dengan sistem 3 in 1

Menyelenggarakan Pelatihan berbasis kompetensi (skilling, upskilling, dan reskilling) tenaga kerja industri dengan sistem 3 in 1

Penyelenggaraan pelatihan vokasi industri di BDI dilakukan dengan sistem 3 in 1 yaitu pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi dan penempatan lulusan pelatihan. Hal ini dilakukan dengan 3 langkah yakni

- Membuat Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama dengan Industri
- Melakukan rekrutmen peserta pelatihan
- Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi
- Melakukan penempatan kerja
- Melakukan tracer study alumni

Mengembangkan skema dan uji kompetensi LSP

Saat ini seluruh BDI telah memiliki LSP Pihak 1 dengan skema sertifikasi sesuai jenis diklat yang dilakukan. Seiring perkembangan kondisi dan kebutuhan diklat, skema sertifikasi perlu terus dikembangkan, melalui

- Mengembangkan skema sertifikasi
- Mengembangkan Materi Uji Kompetensi (MUK)
- Memperkuat asesor kompetensi dari segi teknis dan metodologi
- Mengembangkan Tempat Uji Kompetensi (TUK)
- Sistem Digitalisasi Uji Kompetensi

Mengembangkan sertifikasi kompetensi internasional.

Selain menyelenggarakan sertifikasi kompetensi melalui LSP yang telah dilisensi BNSP seperti yang selama ini dilakukan, BDI perlu melakukan peninjauan kerjasama sertifikasi yang berlaku di negara lain ataupun diakui secara internasional. Ke depan, BDI diharapkan dapat menjadi Authorized Training Body (ATB) pada sektor-sektor industri sesuai spesialisasi kompetensinya, langkah yang dapat dilakukan BDI untuk mencapai hal tersebut adalah dengan :

- Melakukan identifikasi standar kompetensi internasional
- Melakukan identifikasi lembaga sertifikasi internasional
- Melakukan kerjasama dengan lembaga sertifikasi internasional

Membangun sinergi serta menumbuhkan wirausaha industri melalui penyelenggaraan inkubator bisnis

Selain fokus pada penyiapan tenaga kerja industri kompeten, BDI juga berperan dalam penyiapan wirausaha industri melalui jalur inkubator bisnis. Penyelenggaraan inkubator bisnis di BDI harus tetap memepertimbangkan spesialisasi kompetensi serta kompetensi inti yang terdapat di wilayahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan :

- Menjalin kemitraan dengan asosiasi, pelaku industri, politeknik dan Kementerian/Lembaga terkait sebagai akselerator pengembangan inkubator bisnis vokasi industri
- Mendorong peserta pelatihan menjadi wirausaha
- Memfasilitasi kemitraan dengan industri besar
- Mengembangkan fasilitas inkubator bisnis
- Mengembangkan SDM inkubator bisnis (coach, trainer, pengelola)

Membangun smart training facility

Pelatihan yang diselenggarakan bagi para SDM industri sudah sepatutnya perlu disesuaikan dengan era Industri 4.0 yang menjadi tren global maupun nasional. Untuk menyelenggarakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan bagi industri 4.0, dimulai dengan membangun fasilitas training yang cerdas (*smart training facility*). *Smart training facility* merupakan pemanfaatan teknologi terkini sebagai fasilitas penyelenggaraan pelatihan. Hal ini dilakukan dengan:

- Mengembangkan infrastruktur berbasis smart/industri 4.0
- Mengembangkan model *smart training*
- Mengembangkan *Learning Management System* (LMS) yang terintegrasi

Menyelenggarakan pelatihan bagi ASN yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian

Pembina industri merupakan salah satu unsur SDM Industri selain tenaga kerja industri, wirausaha industri. Kebijakan peralihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional yang telah diambil pemerintah berdampak pada peningkatan kebutuhan pelatihan pada setiap jenjang jabatan fungsional. Arah kebijakan pengembangan dan pembinaan pembina industri baik di tingkat pusat maupun daerah telah disusun oleh Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur Kementerian Perindustrian. Sebagai unit kerja pelatihan yang dimiliki Kementerian Perindustrian, BDI juga diamanahkan untuk menyelenggarakan pelatihan bagi pembina industri pusat dan daerah, khususnya bagi jabatan fungsional yang berada di lingkungan Kementerian Perindustrian, hal tersebut dilakukan dengan melakukan :

- Melakukan rekrutmen peserta
- Menyiapkan tenaga pengajar
- Menyiapkan sarana dan prasarana; dan
- Menyiapkan tempat uji kompetensi bagi pejabat fungsional

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BDI Denpasar

Balai Diklat Industri Denpasar sebagai satuan kerja di bawah Pusdiklat Industri telah melakukan reposisi dengan memfokuskan diri pada pelatihan berbasis kompetensi dengan sistem 3-in-1 bagi sumber daya manusia industri khususnya bidang animasi, digital content, dan IOT. Arah kebijakan yang menjadi fokus Balai Diklat Industri Denpasar adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan tenaga kerja industri animasi, digital content, dan IOT yang kompeten melalui sistem pelatihan, sertifikasi, dan penempatan pada perusahaan industri atau dikenal dengan sistem 3 in 1
- Menumbuhkan wirausaha industri melalui program inkubator bisnis
- Mengembangkan program dan kerjasama diklat dengan mitra industri

Dalam rangka melaksanakan program reposisi BDI yang diamanatkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor: 09/SJIND/PER/10/2012 reposisi dimana BDI diarahkan untuk menjadi Pusat Pelatihan dengan spesialisasi dan kompetensi, dan sejalan dengan arah kebijakan Pusdiklat Industri, maka kebijakan BDI Denpasar dalam periode 2020 – 2024 diarahkan pada hal sebagai berikut:

1	<i>BDI Denpasar mengembangkan ruang lingkup dan spesialisasi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri</i>
2	<i>BDI Denpasar mengembangkan program dan modul pelatihan berbasis kompetensi</i>
3	<i>BDI Denpasar menyelenggarakan Pelatihan berbasis Kompetensi dengan Sistem 3 in 1</i>
4	<i>BDI Denpasar mengembangkan skema dan uji kompetensi LSP</i>
5	<i>Mengembangkan sertifikasi kompetensi internasional</i>
6	<i>Membangun sinergi serta menumbuhkan wirausaha industri melalui penyelenggaraan inkubator bisnis</i>

BDI Denpasar mengembangkan ruang lingkup dan spesialisasi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri, yang dilakukan dengan cara

- Mengumpulkan data dan informasi dari perusahaan dan seluruh stakeholder terkait (Asosiasi, Komunitas Industri, Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Pusat dan Daerah) sesuai bidang spesialisasi BDI Denpasar;
- Menangkap kebutuhan industri melalui instrumen survei dan kuesioner sesuai data dan informasi yang terkumpul
- Melakukan verifikasi dan validasi atas instrumen dan kuesioner melalui Forum Group Discussion dengan melibatkan stakeholder terkait, sesuai bidang spesialisasi BDI Denpasar; dan
- Membuat analisa dan laporan atas hasil yang didapatkan sebagai input dalam melakukan Pemetaan Ulang guna membuat Rencana Pelatihan sesuai spesialisasi BDI Denpasar

Hasil pemetaan yang terstruktur dan komprehensif akan berujung pada penentuan pengembangan ruang lingkup dan spesialisasi BDI Denpasar. Dalam penentuan spesialisasi tersebut, BDI Denpasar juga perlu mempertimbangkan perspektif kemampuan internalnya yang mencakup:

- Infrastruktur kompetensi BDI Denpasar yang terdiri dari LSP P1, beserta ketersediaan skema kompetensi yang sesuai dan terkini
- Sarana prasarana pelatihan yang mendukung seperti workshop, laboratorium, peralatan pelatihan baik untuk kegiatan On-site maupun In-site, peralatan pelatihan yang dibutuhkan secara online maupun offline
- Tenaga pengajar yang terdiri dari jabatan fungsional widyaiswara dan instruktur serta dukung instruktur dari industri/asosiasi
- Tenaga kerja praktisi ahli dalam stakeholder BDI
- Sistem pelatihan yang dimiliki melalui LMS (Learning Management System)
- SDM Pendukung sebagai fungsi pendukung jalannya organisasi BDI Denpasar yang terdiri dari berbagai jabatan fungsional, seperti Fungsional Kepegawaian, Fungsional Analisis Anggaran, Fungsional Komputer dan lain-lain

Setelah mengembangkan ruang lingkup dan spesialisasi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri BDI Denpasar dapat melakukan pengembangan program dan modul pelatihan berbasis kompetensi

BDI Denpasar mengembangkan program dan modul pelatihan berbasis kompetensi

Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) merupakan salah model program pengembangan SDM Industri, khususnya dalam ranah tenaga kerja industri yang telah diawali dan dilaksanakan sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini oleh Balai Diklat Industri Denpasar yang menjadi center dan role model pelatihan dengan skema 3 in 1 (pelatihan, uji kompetensi, dan penempatan pada sektor industri).

PBK dilakukan untuk meningkatkan kualitas kompetensi tenaga kerja industri berdasarkan kebutuhan kompetensi industri animasi, digital content, dan IOT, sehingga tercipta link and match antara supply kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan kompetensi pada sektor industri terkait sehingga tercipta link and match antara supply kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia industri.

PBK yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap berdasarkan standar kompetensi, diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja industri yang kompeten dan berdaya saing.

Dengan telah ditetapkannya ruang lingkup dan spesialisai BDI Denpasar, maka BDI Denpasar harus melengkapi program dan modul pelatihan berbasis kompetensi, yang dilakukan dengan :

- Menentukan Paket Pelatihan yang disusun dengan mengelompokkan unit – unit kompetensi yang tercantum dalam SKKNI
- Menyusun Silabi sesuai unit-unit kompetensi dalam tiap paket pelatihan.
- Menyusun Kurikulum, yang merupakan rekapitulasi atas seluruh unit kompetensi dan non-unit kompetensi yang harus ditempuh dalam suatu paket pelatihan
- Mengidentifikasi kebutuhan peralatan dan bahan, agar dapat disiapkan sesuai kebutuhan masing – masing unit kompetensi dan non-unit kompetensi pada setiap paket pelatihan
- Menyusun modul pelatihan berbasis kompetensi sebagai sarana pembelajaran pada diklat berbasis kompetensi. Modul pelatihan berbasis kompetensi dilakukan melalui 3 tahap yakni : menyusun konsep, mengesahkan modul, kemudian melakukan validasi dan revisi modul. Output dari penyusunan modul adalah buku materi dan buku asesmen.

Setelah infrasktruktur kompetensi tersebut di atas tersusun lengkap dan sesuai, maka dilaksanakan Pelatihan berbasis Kompetensi tenaga kerja industri dengan sistem 3 in 1

BDI Denpasar menyelenggarakan Pelatihan berbasis Kompetensi dengan Sistem 3 in 1

Penyelenggaraan pelatihan vokasi industri di BDI Denpasar dilakukan dengan sistem 3 in 1 yaitu pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan penempatan lulusan pelatihan.

Untuk menyelenggarakan pelatihan vokasi industri dengan sistem 3 in 1, langkah yang perlu dilakukan BDI Denpasar adalah:

- Membuat MoU kerjasama dengan industri. Program kerjasama dan kemitraan BDI Denpasar dengan dunia usaha/industri mutlak diperlukan, dengan didasarkan atas kesepakatan yang saling menguntungkan. Bentuk kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah dokumen legal yakni MoU (memorandum of understanding) atau nota kesepahaman. Adapun ruang lingkup kerjasama tersebut mencakup :
 1. Pengembangan program dan modul pelatihan
 2. Rekrutmen peserta pelatihan
 3. Dukungan Instruktur pelatihan dari industri
 4. Fasilitas untuk pelaksanaan pelatihan (off the job / on the job training)
 5. Penempatan kerja bagi lulusan pelatihan
- Rekrutmen peserta pelatihan. Rekrutmen dilakukan untuk membuka kesempatan bagi masyarakat khususnya para calon tenaga kerja dalam rangka meningkatkan keahlian mereka. BDI Denpasar melakukan rekrutmen melalui beberapa jalur diantaranya:
 1. Rekrutmen mandiri penyelenggara diklat, yang dilakukan secara langsung melalui beberapa media
 2. Melalui pemerintah daerah, dimana penyelenggara diklat menerima peserta diklat berdasarkan rekomendasi Dinas Perindustrian / Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Daerah
 3. Melalui mitra penyelenggara diklat, dimana penyelenggara diklat menerima peserta diklat berdasarkan rekomendasi mitra di berbagai tempat; dan
 4. Kerjasama dengan industri yang telah melakukan kerjasama dengan penyelenggara diklat guna menjaring peserta diklat
- Pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi.

Pelaksanaan diklat 3 in 1 dilakukan ketika seluruh tahapan persiapan telah dilakukan dan mendapatkan peserta pelatihansesuai dengan ketentuan pelatihan. Persiapan yang harus dilakukan sebelum melaksanakan pelatihan meliputi:

1. Menentukan metode pelaksanaan pelatihan seperti Onsite/Insite/Online/Klasikal
2. Memastikan kelengkapan dan kesiapan peserta dan instruktur
3. Memastikan kelengkapan dan kesiapan fasilitas praktik
4. Memastikan kelengkapan dan kesiapan kurikulum, modul, dan perlengkapan peserta; dan
5. Menyiapkan dan melaksanakan administrasi pelatihan bagi peserta dan instruktur

Pelaksanaan sertifikasi di akhir pelatihan ditujukan untuk memastikan penguasaan kompetensi dari peserta pelatihan. Di akhir pelaksanaan pelatihan, sertifikasi di selenggarakan dalam bentuk uji kompetensi sesuai dengan skema kompetensi pada Lembaga Sertifikasi Profesi BDI Denpasar. Untuk pelaksanaan uji kompetensi ini, LSP BDI Denpasar memiliki asesor – asesor kompetensi yang menguasai teknis dan metodologi pengujian. Tenaga asesor dapat berasal dari internal BDI atau praktisi industri sepanjang memiliki sertifikat kompetensi dan diberi penugasan oleh LSP BDI Denpasar. Penerbitan sertifikat kompetensi bagi peserta pelatihan yang dinyatakan kompeten dilakukan oleh LSP dengan koordinasi dan pembinaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) selaku lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi secara nasional.

- Penempatan Kerja

Keunggulan ketiga dari program pelatihan 3 in 1 yakni adanya penempatan kerja. Penempatan kerja ditujukan bagi peserta diklat yang telah menyelesaikan rangkaian kegiatan pelatihan serta dinyatakan kompeten dalam sertifikasi kompetensi di akhir masa pelatihan. Penempatan peserta pada suatu industri sesuai dengan kebijakan perusahaan / industri terkait dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan uji kompetensi peserta. Penempatan lulusan pelatihan ditandai dengan berita acara serah terima lulusan ke perusahaan/industri untuk bekerja.

Penempatan kerja merupakan usaha BDI Denpasar untuk menyalurkan kemampuan SDM dari peserta pelatihan sesuai dengan kebutuhan mitra industri. BDI Denpasar perlu memperhatikan penyediaan peserta diklat dan pemerataan kesempatan kerja sesuai dengan kebutuhan dari seluruh mitra industri. Dalam prosesnya, penempatan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas penempatan tenaga kerja yang diatur dalam ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- Tracer study alumni peserta pelatihan

Tracer study adalah pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan kepada alumni peserta pelatihan setelah 3 bulan mengikuti pelatihan di BDI Denpasar. Tujuan dari pelaksanaan tracer study alumni peserta diklat adalah:

1. Mengetahui outcome pelatihan yang diselenggarakan oleh BDI Denpasar
2. Mengetahui kontribusi BDI Denpasar terhadap kompetensi yang ada di dunia industri; dan
3. Monitoring adaptasi terhadap lulusan alumni peserta pelatihan di dunia industri yang diperlukan oleh BPSDMI dan Kementerian Perindustrian

Adapun manfaat dari tracer study alumni bagi beberapa pihak adalah:

1. Bagi BDI Denpasar, tracer study bermanfaat untuk mengetahui penyebaran lulusan peserta pelatihan, bahan evaluasi BDI Denpasar terhadap lulusan alumni yang dihasilkan apakah telah memenuhi standar kompetensi yang sesuai pada dunia industri, dan sebagai bahan informasi mengenai kompetensi yang relevan bagi dunia industri sehingga dapat menjadi masukan dalam memperbaiki kurikulum dan sistem pembelajaran pelatihan
2. Bagi BPSDMI, bermanfaat sebagai alat monitoring BPSDMI/Pusdiklat terhadap lulusan peserta pelatihan di BDI Denpasar ketika memasuki dunia industri
3. Bagi Industri, bermanfaat untuk melihat informasi tentang karakteristik lulusan pelatihan yang dipekerjakan; dan sebagai bahan acuan dalam mengusulkan pelatihan yang lebih relevan

BDI Denpasar mengembangkan skema dan uji kompetensi LSP

BDI Denpasar telah memiliki LSP dengan skema sertifikasi sesuai jenis diklat yang dilakukan. Seiring perkembangan kondisi dan kebutuhan diklat, skema sertifikasi perlu terus dikembangkan. Hal – hal yang perlu dilakukan BDI Denpasar dalam mengembangkan perangkat sertifikasi kompetensinya, antara lain :

1. Menginterpretasi persyaratan pengembangan skema sertifikasi
2. Melakukan perumusan skema sertifikasi
3. Melakukan validasi skema sertifikasi yang mencakup pengajuan skema ke BNSP dan melakukan revisi sesuai hasil validasi
4. Memelihara skema sertifikasi melalui pemantauan secara berkelanjutan terhadap kesesuaian skema sertifikasi yang sudah ada dengan kebutuhan di lapangan

Disamping skema LSP BDI Denpasar juga mengembangkan materi uji kompetensi yang dirancang untuk menilai kompetensi secara tertulis, lisan, praktek, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Adapun langkah – langkah yang dilakukan BDI Denpasar dalam mengembangkan MUK adalah :

- 1.Mengidentifikasi kualifikasi target peserta uji, dan standar kompetensi pada setiap skema sertifikasi, serta menentukan metode – metode penilaian yang dapat digunakan.
- 2.Mengembangkan perangkat asesmen untuk setiap metode penilaian yang mencakup observasi, demonstrasi, pertanyaan lisan dan tertulis, portofolio dan lain-lain
- 3.Melakukan uji coba dan review perangkat asesmen untuk mendapatkan umpan balik sebelum MUK diterapkan pada ases secara luas

LSP BDI Denpasar juga melakukan langkah – langkah guna penguatan asesor dari segi teknis dan metodologi, serta pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK).

Mengembangkan Sertifikasi Kompetensi Internasional

tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri pada saat ini sangat terbuka lebar mengingat kebutuhan tenaga kerja di beberapa negara pada bidang-bidang tertentu relatif besar. Ke depan, BDI Denpasar diharapkan dapat menjadi Authorized Traing Body (ATB) pada sektor industri sesuai spesialisasi kompetensinya. Untuk merealisasikan hal tersebut BDI Denpasar harus mulai melakukan langkah - langkah :

- 1.Melakukan identifikasi standar kompetensi Internasional untuk bidang animasi, desain dan pengembangan web / aplikasi, serta IoT
- 2.Melakukan identifikasi lembaga sertifikasi internasional yang mengeluarkan sertifikat kompetensi internasional untuk bidang animasi, desain dan pengembangan web / aplikasi, serta IoT ; dan
- 3.Melakukan kerjasama dengan lembaga sertifikasi internasional tersebut di atas

Membangun Sinergi serta Menumbuhkan Wirausaha Industri Melalui Penyelenggaraan Inkubator Bisnis

Selain fokus pada penyiapan tenaga kerja industri yang kompeten, BDI Denpasar juga berperah dalam penyepana wirausaha Industri melalui jalur inkubator bisnis, yang tetap memperhatikan spesialisasi kompetensi serta kompetensi inti BDI Denpasar.

Inkubator bisnis merupakan program kolaborasi dengan konsep quadruple helix yaitu melibatkan pemerintah, akademisi, industri, dan komunitas, tiap pihak tersebut memiliki perannya masing – masing. BDI Denpasar sebagai pihak dari pemerintah memiliki peran memberikan dukungan pelatihan, penyiapan fasilitas dan SDM. Dalam melaksanakan perannya inkubator Bisnis BDI Denpasar melakukan

1. BDI Denpasar aktif menjalin kemitraan dengan asosiasi, pelaku industri, politeknik, dan Kementerian/Lembaga terkait dengan akselerator pengembangan inkubator bisnis BDI Denpasar
2. BDI Denpasar mengembangkan dan menyediakan fasilitas (sarana dan prasarana) bagi wirausaha baru
3. BDI Denpasar menyelenggarakan workshop dan pelatihan bagi wirausaha baru dengan berbagai topik terkait pengembangan usaha
4. BDI Denpasar mengembangkan SDM Inkubator Bisnis (coach, trainer, dan pengelola

Dalam melaksanakan strategi tersebut BDI Denpasar perlu mengenali Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan

FAKTOR INTERNAL	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki sarana dan prasarana diklat yang memadai • Memiliki pengalaman dalam melaksanakan diklat teknis dan struktural • Memiliki instruktur dan widyaiswara sebagai tenaga pengajar • Memiliki jejaring kerjasama yang luas dan baik dengan industri, lembaga pendidikan, lembaga keuangan, maupun sesama instansi pemerintahan • Memiliki sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 • Memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi, asesor yang bersertifikasi, serta Tempat Uji Kompetensi yang memadai • Memiliki Inkubator Bisnis 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam proses diklat masih mengandalkan tenaga instruktur diklat yang berasal dari praktisi / mitra industri • Keterbatasan jumlah SDM sehingga tenaga pengajar (instruktur / widyaiswara) cukup intens terlibat dalam pekerjaan – pekerjaan rutin yang bersifat administratif • Skema uji kompetensi belum bisa memenuhi semua kebutuhan industri • Persepsi industri terhadap kualitas lulusan diklat yang masih rendah
FAKTOR EKSTERNAL	Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threat)
<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya minat generasi muda untuk bekerja di bidang animasi dan digital content. • Industri animasi merupakan industri padat karya. • Pertumbuhan industri animasi dan digital content yang baik dan menjanjikan • Kebutuhan tenaga kerja industri animasi yang meningkat 	<ul style="list-style-type: none"> • Mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN • Terdapatnya lembaga – lembaga (swasta maupun pemerintah) yang menawarkan spesialisasi pelatihan serupa • Terbatasnya calon peserta diklat yang memenuhi kualifikasi minimum untuk mengikuti diklat animasi 	

Gambar 3.1 - SWOT

Strategi S-O	Strategi S-T
<ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan diklat animasi berbasis kompetensi secara profesional dan berorientasi pada kebutuhan industri, serta untuk mengisi gap kompetensi yang ada • Menyelenggarakan pelatihan penciptaan wirausaha baru dan mengembangkan inkubator bisnis bagi wirausaha baru bidang kriya dan digital. • Mengembangkan program dan kurikulum diklat sesuai bidang spesialisasi BDI Denpasar, berbasis kompetensi dan berdasarkan SKKNI yang ada • Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang melibatkan peran instansi di daerah, pelaku industri dan asosiasi industri animasi • Menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 secara konsisten 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kelengkapan dan kesiapan sarana prasarana diklat guna mendukung pengembangan program diklat • Menyempurnakan metode rekrutmen melalui berbagai platform, agar menjangkau lebih banyak calon peserta diklat. • Menjajaki kerjasama sertifikasi internasional
Strategi W-O	Strategi W-T
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan keterlibatan instruktur secara klasikal, agar semakin berperan aktif dalam pelaksanaan diklat 3 in 1. • Meningkatkan kompetensi aparatur penyelenggara diklat melalui pelatihan, seminar, dan lain – lain • Melakukan upaya untuk mempublikasi hasil karya peserta diklat dengan memanfaatkan berbagai platform yang ada secara daring. • Mengembangkan, serta memperbarui skema dan materi uji kompetensi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi standar kompetensi internasional sesuai bidang spesialisasi BDI Denpasar • Menjajaki tersedianya LMS (Learning Management System) yang terintegrasi, dievaluasi, dan terbaru secara berkala

Gambar 3.2 - Strategi SWOT

3.2 Kerangka Regulasi

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2020 – 2024, diperlukan kerangka regulasi yang dapat memfasilitasi, dan mendorong upaya pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara. BDI Denpasar sebagai satuan kerja dibawah BPSDMI, tupoksinya dipengaruhi oleh regulasi yang disusun dan ditetapkan selama periode 2020 – 2024 oleh BPSDMI, adapun beberapa regulasi yang disusun dan ditetapkan selama periode 2020 – 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 - Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Instansi	Target Penyelesaian
1	Rpermen Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kompetensi	PP Tentang Sumber Daya Industri	BPSDMI	Ditjen di Lingkungan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BNSP	2022
2	Rpermen Pengembangan Lembaga Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Dunia Industri	PP Tentang Sumber Daya Industri	BPSDMI	Ditjen di Lingkungan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BNSP	2022
3	Rpermen Pengelolaan Inkubator Industri Berbasis Kompetensi	PP Tentang Sumber Daya Industri	BPSDMI	Ditjen di Lingkungan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BNSP	2022
4	Rpermen Penyelenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi dengan Sistem 3 in 1	PP Tentang Sumber Daya Industri	BPSDMI	Ditjen di Lingkungan Kemenperin	2022

3.3 Kerangka Kelembagaan

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, diatur tentang Pembangunan Sumber Daya Industri yang meliputi:

1. Pembangunan sumber daya manusia
2. Pemanfaatan sumber daya alam
3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri
4. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi
5. Penyediaan sumber pembiayaan

Pembangunan sumber daya manusia Industri dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia Indonesia di bidang Industri. Pembangunan sumber daya manusia Industri dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku industri, dan masyarakat, yang memperhatikan penyebaran dan pemerataan ketersediaan sumber daya manusia Industri yang kompeten untuk setiap wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Sumber daya manusia Industri sebagaimana dimaksud di atas meliputi; wirasaha Industri, tenaga kerja Industri, pembina Industri, dan konsultan Industri. Dalam buku “Pembangunan Vokasi Industri Bertaraf Global Menuju Corporate University BPSDMI Kementerian Perindustrian” atas dasar Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1009 Tahun 2021 tentang Pengembangan Vokasi Industri Bertaraf Global menuju Corporate University BPSDMI Kementerian Perindustrian, dinyatakan kebijakan spesialisasi BDI saat ini yang diterapkan pada 7 (tujuh) Balai Diklat Industri, sebagai berikut

Tabel 3.2 - Spesialisasi Balai Diklat Industri

No	Satker	Spesialisasi		
		Kelompok / Bidang Industri	Prioritas	Penunjang
1	BDI Medan	Kimia dasar dan pangan	Kimia, Oleo Chemical (sawit)	Industri berbasis pangan dan produk karet
2	BDI Padang	Pangan, hulu agro, farmasi, tekstil, dan aneka	Agro, pangan, dan Fitopharmacy	Industri berbasis bordir dan desain kemasan industri
3	BDI Jakarta	Alat transportasi, barang modal, komponen, logal dan tekstil	Otomotif, komponen, dan logam	Industri berbasis tekstil/fesyen
4	BDI Yogyakarta	Tekstil, kulit, alas kaki, aneka dan alat kesehatan	Alas kaki, furniture, dan plastik	Industri berbasis tekstil dan alat kesehatan
5	BDI Surabaya	Elektronika, barang modal, tekstil, dan aneka	Elektronika, mekanik dan permesinan	Industri berbasis tekstil dan desain kemasan industri
6	BDI Denpasar	Telematika dan aneka	Animasi, digital content, dan IOT	Industri berbasis aplikasi, pengembangan permainan, dan kriya
7	BDI Makassar	Pangan, hulu agro, farmasi, dan aneka	Agro, pangan, dan Fitopharmaca	Desain kemasan industri

Seperti dalam tabel 3.3, BDI Denpasar memiliki spesialisasi prioritas di bidang animasi, digital content, dan IOT , serta spesialisasi penunjang di bidang industri berbasis aplikasi, pengembangan permainan, dan kriya.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Denpasar yang selanjutnya disebut sebagai Balai Diklat Industri Denpasar adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan industri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri. Balai Diklat Industri Denpasar dipimpin oleh seorang Kepala

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BDI Denpasar yang mendukung pembangunan sumber daya manusia industri sesuai bidang spesialisasinya, dan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran BDI Denpasar, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/5/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri sesuai Pasal (4), susunan organisasinya terdiri atas

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
3. Seksi Pengembangan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas dari masing - masing subbagian / seksi / kelompok jabatan tersebut sebagai berikut

1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan administrasi kepegawaian dan manajemen kinerja, keuangan, persuratan, kearsipan, pengelolaan perpustakaan, kehumasan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pemantauan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Balai Diklat Industri
2. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis spesialisasi dan kompetensi, pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi, penyelenggaraan inkubator bisnis, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
3. Seksi Pengembangan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan identifikasi kompetensi, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan penempatan, monitoring pasca pendidikan dan pelatihan, kerja sama pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan workshop/teaching factory/inkubator bisnis
4. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing - masing berdasarkan peraturan perundang - undangan

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 390 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi maka mulai Juni 2020, BDI Denpasar melakukan penyederhanaan Birokrasi dengan menghapus jabatan struktural untuk eselon IV, sehingga struktur organisasi BDI Denpasar menjadi seperti pada gambar berikut:



Gambar 3.2 - Struktur Organisasi Balai Diklat Industri



BAB IV

TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN

4.1 Indikator dan Target Kinerja

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 – 2024, Balai Diklat Industri Denpasar akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang dijabarkan pada Bab 3. Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil dari satu atau beberapa kegiatan. Berikut merupakan indikator kinerja kegiatan BDI Denpasar 2020 – 2024 :

Tabel 4.1 - Indikator Kinerja Kegiatan

Kode	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU	Satuan	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Tj	Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional						
1	Tersedianya SDM Industri yang Kompeten	Orang	1030	1880	2205	2810	1419

PERSPEKTIF STAKEHOLDER							
SK1	Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja Industri						
Kode	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU	Satuan	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
SK1.1	Lulusan Pelatihan Vokasi Berbasis Kompetensi	Orang	990	1800	2100	2700	1350
PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS							
SK2	Terselenggaranya Urusan Pemerintah di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan						
Kode	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU	Satuan	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
SK2.1	Inkubator Industri yang tumbuh	Tenant	16	16	21	22	23
SK2.2	Pengembangan Sertifikasi Kompetensi Internasional	Sertif.	-	-	1	1	n/a
PERSPEKTIF LEARN & GROWTH							
SK3	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri						
Kode	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU	Satuan	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
SK3.1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan Barang dan Jasa di Balai Diklat Industri Denpasar	Persen	-	50	60	70	80
SK4	Terwujudnya Birokrasi Balai Diklat Industri Denpasar yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada layanan prima						
SK4.1	Nilai Laporan Keuangan Balai Diklat Industri Denpasar	Nilai	-	70	72	74	78
SK4.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Balai Diklat Industri Denpasar	Nilai	78	78	79	79	80
SK4.3	Nilai Kearsipan Balai Diklat Industri Denpasar	Nilai	-	75	77	79	80
SK5	Terwujudnya ASN Balai Diklat Industri Denpasar yang Profesional dan Berkepribadian (SS5)						
SK5.1	Rata - rata indeks Profesionalitas ASN Balai Diklat Industri Denpasar	Indeks	-	71	72	71	72
SK6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien (SS6)						
SK6.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	Persen	-	91,5	92	92	92,2
SK6.2	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Level	-	3	3	4	n/a

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja kegiatan berkaitan dengan sasaran kegiatan.

4.2 Program Kerja dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan tujuan BDI Denpasar yakni “Tersedianya SDM Industri yang Kompeten”. Adapun inisiatif strategis atau kegiatan yang dilakukan oleh BDI Denpasar dalam mencapai sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 - Program dan Kegiatan untuk Mencapai Sasaran Strategis

PERSPEKTIF STAKEHOLDER		
SK1	Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja Industri	
Kode	Indikator Kinerja	Inisiatif Strategis / Aktivitas / Kegiatan
SK1.1	Lulusan Pelatihan Vokasi Berbasis Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun dan mengelompokkan paket pelatihan berdasarkan unit unit kompetensi yang tercantum dalam SKKNI Menyusun jadwal diklat Menyusun silabi Menyusun kurikulum Mengidentifikasi kebutuhan peralatan dan bahan Menyusun modul pelatihan Melakukan rekrutmen peserta Melaksanakan diklat 3 in 1 Melakukan perumusan skema sertifikasi Memelihara skema sertifikasi melalui pemantauan secara berkelanjutan terhadap kesesuaian skema dengan kebutuhan di lapangan. Mengembangkan materi uji kompetensi (MUK) Melakukan penguatan asesor kompetensi dari segi teknis dan metodologi Mengembangkan Tempat Uji Kompetensi (TUK)
PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS		
SK2	Terseleenggaranya Urusan Pemerintah di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	
Kode	Indikator Kinerja	Inisiatif Strategis / Aktivitas / Kegiatan
SK2.1	Inkubator Industri yang tumbuh	<ul style="list-style-type: none"> Mendesain pelatihan kewirausahaan yang terintegrasi Melengkapi sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan inkubator bisnis Memfasilitasi pendampingan tenant oleh tenaga ahli Memfasilitasi fase pengembangan produk dan fase pemasaran tenant Memfasilitasi hubungan tenant dengan lembaga permodalan Memfasilitasi peralatan (BIKIN Makerspace)
SK2.2	Pengembangan Sertifikasi Kompetensi Internasional	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan identifikasi standar kompetensi internasional Melakukan identifikasi lembaga sertifikasi internasional Melakukan kerjasama dengan lembaga sertifikasi internasional

PERSPEKTIF LEARN & GROWTH

SK3	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	
Kode	Indikator Kinerja	Inisiatif Strategis / Aktivitas / Kegiatan
SK3.1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan Barang dan Jasa di Balai Diklat Industri Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan persiapan Pengadaan Langsung maupun Penunjukan Langsung sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku Melaksanakan Pengadaan Langsung maupun Penunjukan Langsung sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku Melaksanakan e-purchasing dengan memprioritaskan barang/jasa yang masuk dalam kategori PDN, serta produk yang telah terdaftar di P3DN Kementerian Perindustrian
SK4	Terwujudnya Birokrasi Balai Diklat Industri Denpasar yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada layanan prima	
SK4.1	Nilai Laporan Keuangan Balai Diklat Industri Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun LK yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, menyajikan informasi dengan cukup didasari Pengendalian Internal yang efektif, serta sesuai dengan peraturan perundangan
SK4.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Balai Diklat Industri Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penyusunan Renstra dan PKT yang sesuai dengan aspek – aspek penilaian Melaksanakan Pengukuran Kinerja yang sesuai dengan aspek – aspek penilaian Melaksanakan penyusunan LAKIP yang sesuai dengan aspek – aspek penilaian Melaksanakan penyusunan PP39 yang sesuai dengan aspek – aspek penilaian
SK4.3	Nilai Kearsipan Balai Diklat Industri Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> Mengelola arsip dinamis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Mengelola arsip statis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Mengolah dan menyajikan arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
SK5	Terwujudnya ASN Balai Diklat Industri Denpasar yang Profesional dan Berkepribadian (SS5)	
SK5.1	Rata – rata indeks Profesionalitas ASN Balai Diklat Industri Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> Memelihara motivasi SDM BDI Denpasar untuk meningkatkan profesionalitas Mengadakan pelatihan / kursus / diklat untuk meningkatkan kompetensi SDM BDI Denpasar
SK6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien (SS6)	
SK6.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> Mengerjakan rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan Inspektorat Jenderal
SK6.2	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan SPIP yang mencakup prinsip dan kerangka manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut

4.3 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BDI Denpasar tahun 2020 – 2024, maka dibutuhkan pendanaan bagi kegiatan yang dijabarkan di atas.

Adapun kebutuhan pendanaan BDI Denpasar tahun 2020 – 2024 terdapat dalam tabel 4.3 dan 4.4 berikut:

Tabel 4.3 - Kerangka Pendanaan TA 2020

Kode	Program / Kegiatan / Output	2020
4597.001	Tenaga Kerja Industri Kompeten Lulusan Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan)	6.290.081.000
4597.007	Kelembagaan Pendidikan Non Formal Industri	71.000.000
4957.008	Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Industri	956.400.000
4957.010	Peralatan Pendidikan Non Formal Industri	436.000.000
4957.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.200.000.000
4957.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	776.355.000
4957.994	Layanan Perkantoran	10.942.976.000
	TOTAL	20.672.812.000

Sejak tahun 2021 terdapat perubahan Kode output dan deskripsinya, sehingga sejak 2021 – 2024 tabel kerangka pendanaan menyesuaikan dengan kode dan deskripsi yang digunakan:

Tabel 4.4 - Kerangka Pendanaan TA 2021 - 2024

Kode	2021	2022	2023	2024
4597.BDB	0	0	91.112.000	135.000.000
4597.FAI	237.240.000	300.000.000	262.144.000	150.010.000
4957.QDJ	900.000.000	1.000.000.000	700.000.000	849.810.000
4957.RBL	1.315.000.000	0	169.670.000	1.159.591.000
4957.SCH	14.443.934.000	14.700.000.000	18.650.000.000	10.400.000.000
4957.EBA	10.047.324.000	10.761.000.000	10.758.944.274	11.306.215.000
4957.EBD	606.272.000	897.000.000	760.000.000	704.160.000
TOTAL	27.549.770.000	27.658.000.000	31.416.804.000	24.704.786.000



BAB V

PENUTUP

Draft Rencana Strategis Balai Diklat Industri Denpasar tahun 2020 – 2024 merupakan rencana jangka menengah yang disusun selaras dengan Renstra BPSDMI, Renstra Pusdiklat dan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis tersebut juga merupakan penjabaran program, kegiatan, sasaran, dan indikator kinerja dalam upaya untuk mencapai visi dan misi selama lima tahun.

Penyusunan Renstra dilakukan secara sistematis, komprehensif, integratif, dan sinergis dengan menggunakan alat bantu Peta Strategi dan Key Performance Indicator (KPI) agar penggunaan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Rencana Strategis BDI Denpasar akan diriviu secara berkala setiap tahunnya dan dilakukan penyesuaian – penyesuaian terhadap perubahan kebijakan.

Kegiatan – kegiatan tahunan telah disusun dan direncanakan berdasarkan kondisi lingkungan saat ini, oleh karena itu seiring dengan berjalannya waktu pelaksanaan, kegiatan – kegiatan tersebut dapat diperkaya sesuai dengan perubahan lingkungan yang ada ketika menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Renstra ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan memberikan kejelasan terhadap tahap – tahap pencapaian visi dan misi Balai Diklat Industri Denpasar.

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024
SK1	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja Industri						
SK1.1	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi (*)	2000	990	1800	2100	2700	1600
Definisi / Deskripsi							
<p>Program pendidikan dan pelatihan (Diklat) dengan skema 3 in 1, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi; 2. Sertifikasi Kompetensi; dan 3. Penempatan Kerja <p>Pelatihan dilakukan dengan menggunakan kurikulum dan modul yang mengacu pada kebutuhan industri untuk menghasilkan lulusan pelatihan yang kompeten dan siap kerja. Pada akhir pelatihan dilakukan sertifikasi kompetensi terhadap peserta pelatihan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa lulusan telah kompeten, proses terakhir adalah penempatan lulusan berdasarkan kerjasama yang telah disepakati dengan pihak industri.</p> <p>Setiap tahun BDI Denpasar mendapatkan target yang harus dicapai. Target itu berupa jumlah lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi.</p>							
Sumber Data							
Aplikasi SIDIA, Berita acara penempatan lulusan diklat 3 in 1							
Cara Menghitung (Formula)							
Jumlah lulusan Diklat 3 in 1							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Orang	Maksimal	Kordinator Penyelenggara Diklat					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024
SK2	Terselenggaranya Urusan Pemerintah di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan						
SK2.1	Inkubator Bisnis yang Tumbuh	9	16	16	21	22	23
Definisi / Deskripsi							
<p>Inkubator bisnis adalah program pembinaan, pendampingan, dan pengembangan usaha. Inkubator bisnis BDI Denpasar dapat diikuti masyarakat umum yang memiliki usaha rintisan.</p> <p>Tahapan kegiatan inkubator bisnis BDI Denpasar mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Pra inkubasi 2. Tahap Inkubasi 3. Tahap Pasca Inkubasi <p>Output dari inkubator bisnis adalah tenant yang memiliki produk dan siap dipasarkan.</p>							
Sumber Data							
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat tanda menyelesaikan kegiatan inkubator bisnis 2. Laporan Tahunan Pelaksanaan Inkubator Bisnis 							
Cara Menghitung (Formula)							
Menghitung jumlah tenant yang mengikuti seluruh tahapan kegiatan inkubator bisnis							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Tenant	Maksimasi	Kordinator Penyelenggara Diklat					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024
SK3	Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri						
SK3.1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan Barang dan Jasa di Balai Diklat Industri Denpasar	-	-	50	60	70	80
Definisi / Deskripsi							
<p>Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022, tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p> <p>Kementerian / Lembaga memonitoring pelaksanaan instruksi Presiden itu dengan melihat persentase nilai capaian penggunaan PDN dalam pengadaan barang dan jasa.</p>							
Sumber Data							
Data pagu dan realisasi dari aplikasi SAKTI untuk akun; 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, dan 533111.							
Cara Menghitung (Formula)							
<p>Persentase dihitung dengan rumus:</p> $\frac{RA_{P3DN}}{TotAP3DN}$ <p>Keterangan: RP3DN: Capaian belanja P3DN RAP3DN: Realisasi belanja P3DN TotAP3DN: Total pagu P3DN</p>							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Persen	Maksimal	Kasub bag TU					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024
SK4	Terwujudnya Birokrasi Balai Diklat Industri Denpasar yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada layanan prima						
SK4.1	Nilai Laporan Keuangan Balai Diklat Industri Denpasar	-	68	70	72	74	78
Definisi / Deskripsi							
<p>Laporan Keuangan (LK) pada satuan kerja BDI Denpasar wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan. Penilaian LK mencakup beberapa komponen pelaporan, diantaranya:</p> <p>1.Kesuaian dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)</p> <p>2.Kecukupan Informasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan LK; • Penjelasan CALK (Penjelasan umum, penjelasan Laporan Realisasi Anggaran, Penjelasan Neraca, Penjelasan Laporan Operasional, Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas, Penjelasan Pengungkapan Penting Lainnya, Kelengkapan Lampiran, Lampiran Cetakan Erekon) <p>3.Efektifitas Pengendalian Internal; dan</p> <p>4.Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan.</p> <p>Tiap komponen memiliki bobot penilaiannya masing-masing. Penilaian tiap komponen meliputi aspek pemenuhan, kualitas, dan implementasi pada satuan kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.</p>							
Sumber Data							
Nilai Laporan Keuangan (LK) sebagaimana yang tertera dalam Form Penilaian Keuangan Tingkat Satuan Kerja.							
Cara Menghitung (Formula)							
Penilaian dilakukan oleh Biro Keuangan Kementerian Perindustrian							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Nilai	Maksimal	Kasub bag TU					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024
SK4	Terwujudnya Birokrasi Balai Diklat Industri Denpasar yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada layanan prima						
SK4.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Balai Diklat Industri Denpasar	86	78	78	79	79	80
Definisi / Deskripsi							
<p>Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dilakukan penilaian atas SAKIP.</p> <p>Penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Kinerja, dengan bobot 30; • Pengukuran Kinerja, dengan bobot 30; • Pelaporan Kinerja, dengan bobot 15; dan • Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja, dengan bobot 25. <p>Penilaian SAKIP tingkat satuan kerja dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.</p>							
Sumber Data							
Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Satuan Kerja							
Cara Menghitung (Formula)							
Perhitungan nilai SAKIP Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permen PAN&RB Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Nilai	Maksimasi	Kasub bag TU					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024
SK4	Terwujudnya Birokrasi Balai Diklat Industri Denpasar yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada layanan prima						
SK4.3	Nilai Kearsipan Balai Diklat Industri Denpasar	-	-	75	79	79	80
Definisi / Deskripsi							
Indikator kinerja ini diharapkan mampu menggambarkan tingkat pengelolaan arsip, sehingga dapat mendukung kinerja BDI Denpasar							
Sumber Data							
Lembar penilaian arsip internal							
Cara Menghitung (Formula)							
Formula atau indikator yang digunakan untuk menilai kearsipan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Penilai dapat berasal dari internal Kementerian Perindustrian maupun eksternal							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Indeks	Maksimasi	Kasub bag TU					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024
SK5	Terwujudnya ASN Balai Diklat Industri Denpasar yang Profesional dan Berkepribadian						
SK5.1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN BDI Denpasar	-	70	71	73	71	72
Definisi / Deskripsi							
<p>Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.</p> <p>Dasar hukum IP ASN adalah Permen PANRB No 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN, Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.</p> <p>Dengan mengukur IP ASN, instansi pemerintah memiliki dasar perumusan pengembangan ASN secara organisasional.</p>							
Sumber Data							
<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) • Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS) • Penilaian prestasi kerja PNS • Data Hukuman Disiplin Pegawai <p>Rekap perhitungan IP ASN terdapat dalam Aplikasi Kinerja Pegawai dalam website www.intranet.kemenperin.go.id</p>							
Cara Menghitung (Formula)							
<p>Rumus pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, yaitu Jumlah Total Hasil Perkalian dari Bobot Indikator dikalikan nilai masing – masing jawaban indikator</p> $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Indeks	Maksimasi	Kasub bag TU					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024
SK6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien						
SK6.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	-	-	91,5	92,0	92,0	92,2
Definisi / Deskripsi							
<p>Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1847 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian Tahun 2022, maka Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan internal untuk level satuan kerja.</p> <p>Pengawasan internal menghasilkan rekomendasi untuk setiap temuan, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Rekomendasi tersebut selanjutnya menjadi acuan bagi satuan kerja untuk melakukan tindak lanjut.</p> <p>Dengan indikator ini, satuan kerja lebih termotivasi untuk melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan internal.</p>							
Sumber Data							
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada Balai Diklat Industri Denpasar							
Cara Menghitung (Formula)							
Penilaian dilakukan oleh Inspektorat Jenderal							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Indeks	Maksimasi	Kasub bag TU					